

TESIS

**PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENATAUSAHAAN
BARANG MILIK DAERAH (BMD) TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN DI MODERASI OLEH SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL
(Studi Pada Kantor Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)**

***THE EFFECT OF HUMAN RESOURCES AND REGIONAL PROPERTY
AGENCY (BMD) ADMINISTRATION ON THE QUALITY OF FINANCIAL
REPORTS MODERATED BY INTERNAL CONTROL SYSTEM
(Study at the Regional Government Office of West Sulawesi Province)***

**GAFFAR
A042192044**



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENATAUSAHAAN
BARANG MILIK DAERAH (BMD) TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN DI MODERASI OLEH SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL
(Studi Pada Kantor Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)**

***THE EFFECT OF HUMAN RESOURCES AND REGIONAL PROPERTY
AGENCY (BMD) ADMINISTRATION ON THE QUALITY OF FINANCIAL
REPORTS MODERATED BY INTERNAL CONTROL SYSTEM
(Study at the Regional Government Office of West Sulawesi Province)***

Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister
disusun dan di ajukan oleh

**GAFFAR
A042192044**



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENATAUSAHAAN
BARANG MILIK DAERAH (BMD) TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN DI MODERASI OLEH SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL
(Studi Pada Kantor Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)**

***THE EFFECT OF HUMAN RESOURCES AND REGIONAL PROPERTY
AGENCY (BMD) ADMINISTRATION ON THE QUALITY OF FINANCIAL
REPORTS MODERATED BY INTERNAL CONTROL SYSTEM
(Study at the Regional Government Office of West Sulawesi Province)***

disusun dan diajukan oleh

**GAFFAR
A042192044**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 19 Januari 2022

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 196406091992031003



Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si
NIP. 197106192000031001

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si
NIP. 197106192000031001



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si
NIP. 196402051988101001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Gaffar**
NIM : A042192044
Program Studi : Magister Keuangan Daerah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul : *Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Bmd) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Moderasi Oleh Sistem Pengendalian Internal*

Adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 24 Januari 2021

yatakan,

Gaffar

PRAKATA

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbi ‘Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister pada Program Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. **Prof. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A**, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin;
2. **Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
3. **Dr. Mursalim Nohong, SE.,M.Si.,CRA.,CRP.,CWM** selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini;
4. Bapak **Prof. Dr. Arifuddin, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CRA.,CRP** dan Bapak **Dr. Mursalim Nohong, SE.,M.Si.,CRA.,CRP.,CWM** selaku tim penasihat tesis atas wafat yang telah diluapkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan. Semoga Allah SWT membalas beliau dengan keberkahan dunia dan akhirat.
5. Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada tim penguji Bapak **Dr. Muhammad Toaha, SE., MBA**, Ibu **Dr. Fatmawati, SE., M.Si** dan Ibu **Dr. Aini Indrijawati, S.E., Ak., M.Si., CA.** atas segala arahan serta ilmu

yang diberikan untuk menyempurnakan tesis ini. Semoga Allah SWT membalas segalanya dalam kebaikan.

6. Terima kasih untuk seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Magister Keuangan Daerah Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan banyak ilmu selama penulis menimba ilmu. Terima kasih untuk segala ilmu yang diberikan.
7. Terima kasih kepada pemerintah provinsi Sulawesi Barat, yang telah memberikan izin dan segala bentuk bantuan kepada penulis selama proses penulis menyelesaikan pendidikan hingga terselesaikannya tesis ini. Untuk para sahabat yang senantiasa memotivasi penulis untuk tidak berhenti berusaha, dan bantuan yang tidak henti-hentinya kepada penulis selama masa studi penulis. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan beliau.
8. Serta untuk keluarga besar mahasiswa Program Studi Magister Keuangan Daerah yang saling membantu dan berbagi doa dan semangat dalam menyelesaikan studi ini, dan semoga Allah SWT mengizinkan semua mimpi-mimpi kita menjadi nyata Aamin Ya Rabbal'Alamin.
9. Terima kasih pula untuk para abdi kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin atas segala bantuan yang diberikan.
10. Tesis ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua yang selalu meridhoi dalam setiap langkah penulis, terima kasih atas segala doa-doanya. dan segala bentuk bantuan yang diberikan kepada penulis.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat meskipun penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 2022

Gaffar

ABSTRAK

GAFFAR. *Pengaruh Sumber Daya Manusia, dan Penatausahaan Barang Milik daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan sistem pengendalian internal Sebagai Variabel moderasi (dibimbing oleh Arifuddin dan Mursalim Nohong)*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sumber daya manusia dan penatausahaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan baik secara langsung maupun dimoderasi oleh sistem pengendalian internal pada Kantor Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Penelitian ini menggunakan metode survey dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik sampel yang digunakan adalah Purposive sampel dengan jumlah sampel sebanyak 126 responden. Data analisis menggunakan analisis *Moderated Regression Analysis (MRA)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sumber daya manusia berpengaruh positif secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan (2) penatausahaan barang milik daerah berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan. (3) sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh antara sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan (4) sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh antara penatausahaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci: Sumber Daya Manusia, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Sistem Pengendalian Internal Kualitas Laporan Keuangan



ABSTRACT

GAFFAR. The Influence of Human Resources and Regional Property Administration on the Quality of Financial Reports with an internal control system as a moderating variable (supervised by **Arifuddin** and **Mursalim Nohong**)

This study aims to determine and analyze the influence of human resources and administration of regional property on the quality of financial reports either directly or moderated by the internal control system at the Regional Government Office of West Sulawesi Province.

This study uses a survey method with data collection techniques using a questionnaire. The sampling technique used is purposive sampling with a total sample of 126 respondents. Data analysis using *Moderated Regression Analysis (MRA)*.

The results showed that (1) human resources had a direct positive effect on the quality of financial reports (2) the administration of regional property had a direct significant effect on the quality of financial reports. (3) the internal control system moderates the influence of human resources on the quality of financial reports (4) the internal control system moderates the effect of the administration of regional property on the quality of financial reports.

Keywords: *Human Resources, Regional Property Administration, Internal Control System Quality of Financial Reports*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Teori Dan Konsep.....	11
2.1.1 <i>Theory Stewardship</i>	11
2.1.2 Theory Kegunaan Keputusan.....	12
2.1.3 Theory Kepatuhan.....	14
2.1.4 Sumber Daya Manusia.....	16
2.1.5 Penatausahaan Badan Milik Daerah	18
2.1.6 Sistem Pengendalian Internal.....	20
2.1.7 Kualitas Laporan Keuangan.....	23
2.2 Penelitian Empiris.....	27

BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS.....	31
3.1 Kerangka Pemikiran	31
3.2 Hipotesis	33
3.2.1 Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	33
3.2.2 Pengaruh Penatausahaan BMD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	35
3.2.3 Sumber Daya Manusia Berpengaruh Secara Tidak Langsung Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	37
3.2.4 Penatausahaan Barang Milik Daerah berpengaruh Secara tidak Langsung terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	38
BAB IV METODE PENELITIAN	40
4.1 Rancangan Penelitian.....	40
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	40
4.3 Populasi dan Teknik Sampling	41
4.3.1 Populasi.....	41
4.3.2 Sampel	41
4.4 Jenis dan Sumber Data	42
4.5 Metode Pengumpulan Data	42
4.6 Definisi Operasional	42
4.7 Instrument Penelitian.....	45
4.8 Teknik Analisis Data	48
4.9 Model Analisis Data	51
BAB V HASIL PENELITIAN	54
5.1 Deskripsi Data	54
5.2 Analisis Data.....	57
5.3 Pengujian Validitas dan Realibilitas Instrument.....	58
5.3.1 Uji Validitas.....	58
5.3.2 Uji Realibilitas	59

5.4	Uji Asumsi Klasik	61
5.4.1	Uji Normalitas.....	61
5.4.2	Uji Multikolinieritas.....	61
5.4.3	Uji Heterokedatisitas.....	62
5.5	Pengujian Hipotesis	63
5.5.1	Hasil Analisis Regresi Berganda	63
5.5.2	Moderated Regression Analysis	65
BAB VI PEMBAHASAN.....		68
6.1	Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	68
6.2	Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	69
6.3	Sistem Pengendalian Internal Memoderasi Pengaruh Sumber Daya Manusia Dengan Kualitas Laporan Keuangan	71
6.4	Sistem Pengendalian Internal Memoderasi Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	74
BABV II PENUTUP.....		76
7.1	Kesimpulan.....	76
7.2	Saran	77
7.3	Implikasi	78
7.4	Keterbatasan	79
DAFTAR PUSTAKA		80
LAMPIRAN.....		89

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1 Pedoman Kategorisasi Rata-Rata Skor Tanggapan Responden.....	47
Tabel 5.1. Karakteristik Tingkat Pendidikan Terakhir.....	55
Tabel 5.2 Statistika Deskriptif	57
Tabel 5.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel.....	59
Tabel 5.4 Uji Realibilitas	60
Tabel 5.5 Hasil Uji Asumsi Normalitas	61
Tabel 5.6 Hasil Uji Asumsi Multikolinieritas	61
Tabel 5.7 Hasil Uji Asumsi Non-Heteroskedastisitas.....	62
Tabel 5.8 Analisis Regresi Linear Berganda.....	63
Tabel 5.9 Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 3.2 Kerangka Konseptual	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan

pemerintah. (<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2010/71tahun2010pp.htm>)

Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah (Badjuri dan Trihapsari, 2004). Selanjutnya Badjuri dan Trihapsari (2004) mengatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur

pemerintah berjalan dengan baik.

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah daerah harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih *accountable* dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun dalam praktek penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, fenomena yang ada (kenyataan) masih berbeda dengan harapan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) didapati masih banyak laporan keuangan pemerintah daerah disusun belum berkualitas, karena belum menyajikan data-data keuangan yang sesuai dengan standar dan peraturan. Disamping itu juga, masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan berhasil ditemukan dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah (Wungow, 2016). Hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun 2019 lima puluh lima persen (55%) opini yang diberikan oleh BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Wajar Dengan Pengecualian (Ihps BPK RI, 2019).

Menurut Hidayati, et al. (2016), lemahnya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan faktor yang menyebabkan masih banyaknya pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Bahkan pada kasus tertentu, ada daerah yang bahkan mengalami penurunan opini dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Tidak Memberi Pendapat (TMP) yang disebabkan ketidakmampuan mewujudkan tata kelola aset/ barang pemerintah daerah secara baik (Ferdianus, 2013).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, pengelolaan BMD adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani BMD, dengan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset/BMD. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan barang milik daerah mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dengan pengelolaan BMD yang efisien dan efektif mulai dari perencanaan sampai dengan pengendaliannya diharapkan dapat menghindari penyimpangan dari peraturan yang berlaku terlebih pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Namun fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih berkebutuhan dengan permasalahan aset/BMD. Dimana dilihat berdasarkan hasil temuan badan pemeriksa keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2019 mengungkapkan bahwa pengelolaan asset tetap belum

dilaksanakan sesuai ketentuan. Pemeriksaan atas pengelolaan aset tetap tahun anggaran 2019 ditemukan permasalahan sebagai berikut:

- a. Pengamanan kepemilikan dan pencatatan aset tetap tanah belum memadai.
- b. Pengamanan bukti kepemilikan dan pencatatan aset tetap kendaraan bermotor belum memadai.
- c. Peralatan dan mesin berupa kendaraan bermotor dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang dan terdapatnya kendaraan bermotor yang tidak dikembalikan oleh pegawai mutasi.
- d. Bantuan kementerian pendidikan kebudayaan berupa barang dan uang untuk pengadaan aset tetap belum dicatat.
- e. Terdapat kelemahan pengendalian atas pencatatan aset tetap yang berasal dari pekerjaan yang menghasilkan lebih dari satu jenis aset tetap.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa laporan keuangan masih rendah dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan barang milik daerah dan sistem pengendalian internal.

Fakta bahwa sumber daya manusia adalah faktor penting untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menerapkan Standar Akuntansi Keuangan adalah manusia (Indriasih, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Triantoro dan Nugraha (2014); Nirwana dan Haliah (2018); Afny *et al.* (2018);

Silaban (2017); Rijalulfikri (2017); Septarini dan Papilaya (2016); dan Maksyur (2015) menemukan adanya pengaruh positif dan signifikan antara sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, hasil penelitian Syarifudin (2014) dan Karmila *et al.* (2014), tidak mendukung hal tersebut dengan memberikan bukti empiris bahwa sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu juga barang milik daerah merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan barang milik daerah memerlukan perhatian tersendiri karena terjadi peningkatan nilai barang milik daerah dari tahun ke tahun yang cukup signifikan. Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah, pengakuan/penilaian dan penyajian serta pengungkapan barang milik daerah menjadi fokus utama. Hal ini karena barang milik daerah memiliki nilai yang sangat signifikan dan sangat kompleks. Upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilakukan tanpa membenahan pengelolaan barang milik daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi bahwa pelaksanaan desentralisasi tidak hanya sebatas pada desentralisasi pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan dari pemerintah daerah ke SKPD, tetapi juga desentralisasi pengelolaan aset daerah hingga ke level satuan kerja. Jika pada era sebelumnya pengelolaan barang milik daerah tersentralisasi di biro/bagian perlengkapan, maka saat ini pengelolaan aset tersebut didesentralisasikan ke masing-masing SKPD. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui prinsip – prinsip

pengelolaan barang milik daerah agar dapat dikelola secara optimal.

Pelaksanaan dan pengelolaan barang milik daerah yang baik harus dilakukan dengan penatausahaan yang tertib dan teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Barang milik daerah merupakan salah satu factor yang paling strategis dalam pengelolaan kualitas laporan keuangan daerah. Pada umumnya nilai BMD merupakan nilai yang paling besar dibandingkan dengan akun lain pada laporan keuangan. Jika penatausahaan tidak tertib maka barang milik daerah yang dilaporkan dalam neraca menjadi tidak valid, akibatnya neraca tersebut tidak mencerminkan nilai asset yang sewajarnya (Mahmudi, 2010).

Keberagaman data pencatatan aset memunculkan masalah dalam penatausahaan, oleh karenanya proses penatausahaan membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah mengingat golongan aset yang dipersyaratkan harus sesuai standar akuntansi pemerintahan sebab tidak semua data telah lengkap atau dimiliki dengan benar dan pencatatannya belum terintegrasi. Dengan tidak adanya data yang terintegrasi, maka akan sangat menyulitkan pemerintah daerah dalam membuat status neraca yang dapat diyakini oleh stakeholder. Kepercayaan tersebut meliputi kebenaran terhadap lokasi/alamat aset, jumlah aset, pengguna aset, spesifikasi aset dan nilai aset (Yusuf, 2010:9).

Aset yang dimiliki pemerintah daerah sangat bervariasi baik jenis maupun jumlahnya. Akumulasi aset daerah yang bernilai ekonomis besar dan secara fisik terdiri dari berbagai jenis dan tersebar lokasinya menimbulkan kompleksitas dan berpotensi memunculkan permasalahan baik dalam pengelolaan, pemanfaatan, maupun pencatatannya disebabkan lemahnya koordinasi dan pengawasan atas

pengelolaan aset daerah (Mahmudi, 2010). Dalam rangka mengelola barang milik daerah agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan pengamanan sehingga memberi nilai aset bagi daerah. Pengamanan adalah kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan barang milik daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum agar barang-barang milik daerah dapat dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambilalihan atau klaim dari pihak lain (Ketaren, 2014).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah adalah sistem pengendalian internal. Jika pengendalian intern diterapkan dengan baik dalam organisasi akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas (Rijalulfikri, 2017). Pengendalian intern yang mana merupakan suatu proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai agar memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan juga ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008).

Sistem pengendalian internal yang memadai akan mempengaruhi penerapan standar akuntansi, dan secara langsung meningkatkan kualitas laporan keuangan (Rijalulfikri, 2017). Hasil penelitian yang mendukung yaitu Syarifudin (2014), bahwa dengan adanya pengendalian intern yang efektif akan dapat meminimalisir resiko kesalahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, sehingga penerapan sistem pengendalian intern pemerintah sangat membantu manajemen

pemerintahan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, khususnya dalam rangka meningkatkan keandalan laporan keuangan. Suatu pengendalian internal yang efektif akan menurunkan resiko informasi dan meningkatkan kelengkapan dan keakuratan informasi yang direncanakan. Hasil berbeda ditemukan dalam beberapa penelitian, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Septarini dan Papilaya (2016) dan Anggraeni dan Riduan (2014) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Keberhasilan pemerintahan daerah dalam menyusun laporan keuangan tidak akan terlepas dari keterkaitan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan. Menurut COSO Whitepaper (2012), standar pengendalian intern yang sudah diterapkan di hampir seluruh entitas diseluruh dunia adalah sistem pengendalian intern yang ditetapkan COSO. Pengendalian internal sendiri adalah sebuah proses yang dipengaruhi oleh pimpinan dan semua personil lainnya dalam entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasional, pelaporan, dan kepatuhan (Coso, 2013).

Teori *stewardship* menjelaskan kecenderungan *steward* untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai keinginan prinsipal dinilai masih terjadi pada manajemen pemerintahan daerah. Hal ini dibuktikan dalam tujuan pemerintahan daerah sebagai salah satu aset daerah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya yang nantinya akan diberikan sebagian kepada pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Oleh karena itu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai dasar pengambilan keputusan, maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh sumber daya manusia, penatausahaan badan milik daerah terhadap kualitas pelaporan keuangan dimoderasi oleh sistem pengendalian internal pada Pemerintah Daerah Sulawesi Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Apakah penatausahaan badan milik daerah berpengaruh secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Apakah sistem pengendalian internal dapat memoderasi pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Apakah sistem pengendalian internal dapat memoderasi penatausahaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh secara langsung sumber daya

manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh secara langsung penatausahaan badan milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dimoderasi oleh pengendalian internal sebagai variabel moderasi.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penatausahaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan dimoderasi oleh sistem pengendalian internal.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan berguna secara akademis dan Praktis.

a) Kegunaan Teoretis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan data empiris yang bermanfaat sebagai masukan dan menambah wawasan mengenai pentingnya laporan keuangan yang berkualitas.

b) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pengelolaan keuangan yang lebih efektif melalui penyajian informasi yang berkualitas dengan memperhatikan sumber daya manusia yang dipekerjakan, dan pengelolaan, penatausahaan barang milik daerah, serta sistem pengendalian internal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Stewardship Theory

Stewardship theory merupakan bagian dari *agency theory* yang menggambarkan kondisi dimana manajemen tidak termotivasi terhadap tujuan-tujuan individu, melainkan lebih kepada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson *et al.*, 1991). *Stewardship theory* menjelaskan tentang hubungan kerja antara dua pihak, pemilik dan *steward* (Davis *et al.*, 1997; Donaldson *et al.*, 1991), serta menjelaskan tentang hubungan dari perilaku dan perspektif struktur.

Kinerja perusahaan yang maksimal, seperti pertumbuhan penjualan atau profitabilitas merupakan hasil yang diinginkan dari perspektif penatagunaan, sementara dalam teori ini menunjukkan hasil tersebut dapat dicapai ketika pemilik dan *steward* dalam satu hubungan kerja memilih untuk berperilaku sebagai penatalayanan (Davis *et al.*, 1997). Asumsi bahwa ketika kedua belah pihak memilih untuk berperilaku sebagai penatalayanan dan menempatkan kepentingan pemilik terlebih dahulu, maka teori ini menyatakan terdapat hubungan yang positif pada kinerja karena kedua belah pihak bekerja kearah tujuan yang sama (Davis *et al.*, 1997).

Pilihan perilaku *steward* dipengaruhi oleh faktor psikologis dan situasional. Faktor psikologis seperti motivasi intrinsik, identifikasi tinggi, dan kekuatan pribadi dapat mengarahkan pilihan perilaku untuk pengelolaan. Motivasi intrinsik

ada di dalam individu dan memberikan kepuasan terhadap dirinya sendiri. *Stewardship theory* menerapkan perspektif kekuatan pribadi, menggambarkan kekuasaan berdasarkan hubungan interpersonal yang berkembang dari waktu ke waktu (Davis *et al.*, 1997).

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi setiap perusahaan daerah sebagai lembaga yang didirikan berdasarkan modal yang tidak dipisahkan dari APBD. Oleh sebab itu, manajemen (*steward*) dapat dipercaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, menghasilkan kualitas laporan keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga pelayanan publik dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, maka *steward* mengerahkan semua kemampuan dan keahlian untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2.1.2 Teori Kegunaan Keputusan (*Decision Usefulness*)

Teori Kegunaan Keputusan (*Decision Usefulness*) pertama kali digunakan oleh Chambers, dan mengatakan bahwa:

“Akibat yang wajar dari asumsi manajemen rasional adalah bahwa seharusnya ada suatu sistem yang menyajikan informasi; seperti sistem yang diperlukan baik sebagai dasar pembuatan keputusan ataupun dasar untuk memperoleh konsekuensi keputusan. Sistem yang menyajikan seluruh informasi secara formal akan disesuaikan dengan dua dalil umum, yakni pertama adalah kondisi dari setiap wacana ilmiah, sistem harus konsisten secara logika, tidak ada aturan atau proses yang bertentangan dengan setiap aturan maupun proses lainnya. Dan yang kedua muncul dari *stakeholder* laporan akuntansi yang menjadi dasar pengambilan keputusan dari konsekuensi praktik, setiap sistem seharusnya menghasilkan informasi yang relevan dengan berbagai bentuk pembuatan keputusan yang diharapkan dapat digunakan (dalam Belkoui, 2001).”

Teori kegunaan keputusan mencakup mengenai syarat dari kualitas informasi akuntansi yang berguna dalam keputusan yang akan diambil oleh

pengguna. Teori kegunaan keputusan menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual *Financial Accounting Standard Boards (FASB)*, yaitu *Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC)* yang berlaku di Amerika Serikat (Staubus, 2000). Pada SFAC No. 2 tentang *Qualitative Characteristics of Accounting Information* digambarkan hirarki dari kualitas informasi akuntansi yaitu dalam bentuk kualitas primer, kandungannya dan kualitas sekunder. Bentuk kualitas primer dari informasi akuntansi yang berguna dalam pengambilan keputusan adalah nilai relevan (*relevance*) dan reliabilitas (*reliability*). Menurut FASB nilai relevan dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang harus dipenuhi agar informasi akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan. Nilai relevan dapat diklasifikasikan sebagai kapasitas informasi untuk membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan oleh pemakai informasi. Sedangkan reliabilitas didefinisikan sebagai kualitas pemberian jaminan bahwa informasi tersebut secara rasional bebas dari kesalahan dan bias, dan dapat mewakili apa yang digambarkan.

Informasi menjadi relevan apabila informasi tersebut logis dan rasional jika dihubungkan dengan suatu keputusan. Adapun pernyataan dari FASB bahwa agar informasi menjadi relevan bagi investor, kreditur, dan pihak lainnya dalam rangka investasi, kredit dan keputusan sejenisnya, maka diperlukan informasi akuntansi yang memiliki kapabilitas untuk membuat suatu perbedaan pada suatu keputusan. Hal ini ditempuh dengan cara membantu pemakai untuk memperoleh prediksi tentang hasil dari kejadian dimasa lalu, sekarang, maupun dimasa mendatang atau untuk mengkonfirmasi dan membenarkan harapan dari pemakai informasi.

Kandungan kualitas primer dari kegunaan-keputusan informasi akuntansi adalah komponen-komponen kandungan dari nilai relevan diantaranya ketepatanwaktuan (*timeliness*), nilai umpan balik, dan nilai prediktif (*predictive value*), dan komponen-komponen yang menjadi kandungan reliabilitas, yaitu penggambaran yang senyatanya, netralitas, dan dapat diverifikasi. Selain kualitas primer, ada pula kualitas sekunder sebagai penghubung antara kualitas primer, yaitu komparabilitas (*comparability*) dan taat asas (*consistency*).

2.1.3 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kepatutan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Jika melanggar kepatutan belum tentu melanggar kepatuhan. Selain itu, kepatuhan menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu. Seperti yang dikemukakan Tyler (Susilowati, 1998, 2003, 2004 dalam Saleh, 2004) terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan moral

dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku (Sudaryanti, 2008 dalam Sulistyono, 2010).

Dalam organisasi modern, keberadaan suatu sistem merupakan inti yang menggerakkan roda organisasi sehingga dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan. Sebuah sistem dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan, tata tertib, bahkan budaya dalam organisasi yang memberikan petunjuk serta arahan bertindak dan berperilaku bagi anggota organisasi. Efektifitas peraturan dalam suatu sistem organisasi juga tidak terlepas dari faktor ketaatan atau kepatuhan dari tiap anggota organisasi terhadap aturan yang ada. Kelman membedakan kualitas ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan dalam tiga jenis, yaitu :

- a. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
- b. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa bahwa aturan tersebut materi dan spiritnya sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. Peraturan

berjalan kurang efektif bila derajat ketaatannya hanya berkisar di compliance atau identification saja. Sebaliknya, bila derajat kepatuhannya mencapai internalisation, berarti kualitas efektifitas peraturan tersebut sudah sangat tinggi, sehingga sistem berjalan sesuai dengan aturan yang ada tanpa menekankan fungsi kontrol yang ketat.

- c. Ketaatan yang bersifat internalisation, yaitu jika seseorang taat nasabah, pasar dan masyarakat secara keseluruhan

2.1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menurut Hasibuan (2007:244) adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa lahir (modal dasar) sedangkan kecakapan diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan). Kecerdasan tolak ukurnya Intelligent Quotient (IQ) dan Emotion Quality (EQ). Sumber daya manusia merupakan semua potensi yang dimiliki oleh manusia yang dapat disumbangkan/diberikan kepada masyarakat untuk menghasilkan barang/jasa (Sedarmayanti, 2016:11). Subekhi et al. (2012:13), mengutip pendapat Abdurarhmat Fathoni (2006:8) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia. Manusia sebagai unsur terpenting mutlak dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut. Waktu, tenaga, dan kemampuannya benar benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi, maupun bagi kepentingan individu. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan sangat ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusia di dalamnya.

Kompetensi merupakan karakteristik dasar seseorang yang terdiri dari

knowledge, skill dan *attitude* yang ada hubungannya dengan prestasi kerja yang luar biasa atau dengan efektivitas kerja (Spencer dan Spencer, 1993; Edison *et al.*, 2016; Suparyadi, 2015). Kompetensi sumber daya manusia juga menunjukkan karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan meningkatkan standar kualitas profesional dalam pekerjaannya.

Sumber daya manusia harus memiliki kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi lulusan akuntansi yang ditetapkan oleh IFAC (*International Federation of Accountants*), yakni IES (*International Education Standards*), dalam hal ini IES 2, IES 3, dan IES 4 yang mencakup dimensi *knowledge, skills, and attitude*. Cakupan dimensi tersebut akan dijelaskan dalam tabel berikut.

1 Pengetahuan (*knowledge*)

- a. Ilmu akuntansi. Keuangan dan ilmu pengetahuan terkait lainnya.
- b. Pengetahuan mengenai kegiatan bisnis/sector public dan pengorganisasian.
- c. Pengetahuan dan kompetensi di bidang teknologi informasi.

2 Kemampuan (*skill*)

- a. Keterampilan teknis dan fungsional
- b. Keterampilan intelektual
- c. Keterampilan berorganisasi
- d. Keterampilan personal
- e. Keterampilan komunikasi dan intrapersonal

3 Perilaku (*attitude*)

- a. Kepentingan public dan sensitifitas terhadap tanggung jawab social

- b. Pengembangan diri dan belajar secara terus menerus
- c. Dapat diandalkan, bertanggung jawab, tepat waktu dan saling menghargai.
- d. Hukum dan peraturan yang berlaku.

2.1.5 Penatausahaan Barang Milik Daerah

Penatausahaan BMD adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Permendagri No 17 Tahun 2007 dan pada tahun 2016).

Dengan penatausahaan BMD akan dapat diketahui secara pasti nilai kekayaan daerah, status kepemilikan, pemanfaatan serta pemeliharaan terhadap BMD yang dikuasai pemerintah daerah. Sehingga akan menghasilkan sinkronisasi antara laporan keuangan pemerintah daerah dengan laporan BMD. Penatausahaan barang milik daerah dalam mewujudkan tertib administrasi termasuk menyusun laporan barang milik daerah yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah. Dalam penatausahaan barang milik daerah ini termasuk didalamnya melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi barang milik daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi akuntansi barang milik daerah yang dimaksud mengacu kepada standar akuntansi pemerintah (SAP) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Penatausahaan barang milik daerah dilakukan dengan tiga kegiatan yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

- a. Pembukuan

Permendagri No 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah kedalam

daftar barang pengelola menurut golongan dan kodefikasi barang dan kedalam kartu inventarisasi barang serta dalam daftar barang milik daerah. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna (DBP)/daftar barang kuasa pengguna (DBKP).

b. Inventarisasi

Inventarisasi merupakan kegiatan atau Tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir, mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Untuk dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi aset daerah secara objektif dan dapat diandalkan pemerintah daerah perlu memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang independent.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa inventarisasi barang milik daerah paling sedikit dilakukan 1 kali dalam 5 tahun oleh pengguna barang. Tetapi inventarisasi dilakukan setiap tahun untuk barang milik daerah berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan.

c. Pelaporan

Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa pelaporan barang milik daerah yang dilakukan, kuasa pengguna barang harus disampaikan setiap semesteran dan tahunan kepada pengguna barang.

Hasil dan laporan kuasa pengguna barang yang disampaikan tersebut kemudian digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan barang pengguna semesteran dan tahunan yang kemudian akan disampaikan kepada pengelola barang sebagai dasar dalam penyusunan SKPD.

Penelitian Anggareini (2015) dan Febrianti (2016) menunjukkan bahwa penatausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penatausahaan aset/barang maka semakin baik kualitas pada laporan keuangan pemerintah daerah. Namun terdapat juga penelitian yang tidak mendukung yakni penelitian yang dilakukan oleh Hidayati, et al. (2016), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan BMD yang salah satunya penatausahaan tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2.1.6 Sistem Pengendalian Internal

Menurut *Committee of Sponsoring organizations of Treadway Commisions (COSO)* 2013, Pengendalian internal adalah sebuah proses yang dipengaruhi oleh pimpinan, structural, Menurut Arens *et al.* (2012), pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan pencapaian yang wajar atas tujuan manajemen dalam hal keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Adapun pendapat dari Mardiasmo (2004) tentang efektivitas pengendalian internal diukur dari keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, sehingga aktivitas pengendalian harusnya berjalan efektif dan efisien, laporan keuangan tersaji dengan andal, pengamanan aset/kekayaan perusahaan,

ketaatan/kepatuhan terhadap undang-undang, serta kebijakan lain untuk mencapai tujuan pengendalian itu sendiri.

Berdasarkan *Committee of Sponsoring organizations of Treadway Commisions (COSO 2013)*, dan PP nomor 60 tahun 2008 menyatakan beberapa komponen pengendalian internal sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Enviromment*)

Pimpinan dan seluruh karyawan dalam suatu perusahaan harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian dalam keseluruhan perusahaan yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Lingkungan pengendalian internal mencakup (a) penegakan integritas dan nilai etika; (b) komitmen terhadap kompetensi; (c) kepemimpinan yang kondusif; (d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; (e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; (f) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; (g) perwujudan peran aparat pengawas internal yang selektif; (h) hubungan kerja yang baik dengan perusahaan terkait.

2. Penilaian Resiko (*Risk Assessment*)

Pengendalian internal harus memberikan penilaian atas resiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian resiko terdiri atas identifikasi resiko dan analisis resiko.

3. Kegiatan pengendalian (*Control Activities*)

Kegiatan pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa arah atau tujuan pimpinan telah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif

dalam pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan pengendalian terdiri atas (a) reviu atas kinerja perusahaan; (b) pembinaan sumber daya manusia; (c) pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; (d) pengendalian fisik atas aset; (e) pemisahan fungsi; (f) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; (g) dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting; (h) pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.

4. Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada perusahaan dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. Penyelenggaraan sistem informasi yang efektif oleh pimpinan meliputi (a) penyediaan dan pemanfaatan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; (b) pengelolaan, pengembangan, dan pembaharuan sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan/Pengawasan (*Monitoring Activities*)

Pemantau harus dapat menilai kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindak lanjuti. Pemantauan sistem pengendalian internal dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, tindak lanjut rekomendasi audit dan reviu lainnya.

2.1.7 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.7.1 Pengertian Laporan Keuangan

Tang *et al.* (2012) mendefinisikan kualitas laporan keuangan sebagai laporan yang memberikan informasi yang benar dan adil tentang kinerja yang mendasari dan tentang posisi keuangan. Pendapat lain menyatakan bahwa pelaporan keuangan yang berkualitas mencerminkan informasi keuangan yang lengkap dan transparan yang tidak disusun untuk mengaburkan dan menyesatkan pengguna (Jonas and Balnchet, 2000). Menurut FASB, peran pelaporan keuangan sangat kompleks dan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan serta informasi dari sumber lain untuk menyediakan efisiensi fungsi modal dan pasar lainnya serta bantuan alokasi yang efisien dari sumber daya langka dalam ekonomi. Oleh sebab itu, konsep kualitas laporan keuangan sangat luas termasuk pengungkapan informasi dan non-keuangan yang berfungsi dalam pengambilan keputusan. (Tasios and Bekiaris, 2012).

Informasi akuntansi keuangan digunakan untuk berbagai tujuan dan spesifik, terutama yang terkait dengan proses pengambilan keputusan. Beberapa kategori pengguna dari informasi akuntansi diantaranya investor, kreditor, lembaga pemerintah, manajemen, karyawan dan klien, yang masing-masing tertarik pada beberapa informasi spesifik yang sangat berharga bagi mereka. Jadi, informasi akuntansi harus berkualitas tinggi karena informasi tersebut menggambarkan kondisi ekonomi suatu perusahaan (Achim dan Chis, 2014).

2.1.6.2 Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan

Karakteristik kualitas laporan keuangan sebagaimana dinyatakan dalam

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 20015) nomor satu adalah sebagai berikut.

1. Relevan

Suatu informasi harus memenuhi kriteria relevan untuk bisa digunakan oleh pengguna laporan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Peran informasi dalam peramalan (*predictive*) dan penegasan (*confirmatory*) berkaitan satu sama lain. Misalnya, informasi struktur dan besarnya aset yang dimiliki bermanfaat bagi pengguna ketika mereka berusaha meramalkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan peluang dan beraksi terhadap situasi yang merugikan. Sedangkan peran informasi yang memberi penegasan adalah terhadap prediksi masa lalu, misalnya tentang bagaimana struktur keuangan perusahaan diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan.

Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pengguna, seperti pembayaran deviden dan upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam bentuk ramalan

eksplisit. Namun, kemampuan laporan keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan menampilkan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu. Misalnya nilai prediktif laporan laba rugi dapat ditingkatkan jika pos-pos penghasilan atau beban yang tidak biasa, abnormal, dan jarang terjadi, diungkapkan secara terpisah.

2. Keandalan

Informasi yang tersaji dalam laporan keuangan juga harus handal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus dan jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Berikut ciri laporan yang mengandung keandalan, yaitu:

- a. Penyajian Jujur, yaitu nilai dalam laporan keuangan harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aset, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.
- b. Substansi mengungguli bentuk, artinya jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya bentuk hukumnya.
- c. Netralitas, yaitu informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pengguna. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang

menguntungkan beberapa pihak saja.

- d. Pertimbangan sehat, artinya saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, aset atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi, dan beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Karena hal ini bisa mengakibatkan laporan keuangan menjadi tidak netral dan oleh karenanya tidak memiliki kualitas andal.
- e. Kelengkapan, yaitu laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.

3. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna laporan juga dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.

4. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Artinya, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya

dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

2.1 Penelitian Empiris

Literatur yang menjadi bahan rujukan pada penelitian ini dengan variabel yang sama, adalah sebagai berikut.

Indriasari dan Nahartyo (2008) meneliti pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah kota Palembang dan kabupaten Ogan Ilir). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan. Indriasari dan Nahartyo (2008) juga menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) meneliti pengaruh sumber daya manusia dan informasi teknologi pemanfaatan kehandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian internal akuntansi. Hasil penelitiannya menyatakan Sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan

pemerintah daerah, tetapi tidak signifikan terhadap ketepatanwaktuan. Pemanfaatan TI berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan dan ketepatanwaktuan.

Nirwana dan Haliah (2018) melakukan penelitian mengenai *Determinant factor of the quality of financial statement and performance of the government by adding contextual factors*. Penelitian ini menguji tentang faktor-faktor penentu kualitas laporan keuangan dan kinerja pemerintah dengan menambahkan faktor kontekstual, seperti faktor pribadi, sistem/ faktor administrasi dan politik yang dapat memengaruhi kualitas dan kinerja informasi laporan keuangan. Hasilnya menunjukkan faktor pribadi, sistem/faktor administrasi dan politik berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Syarifuddin (2014) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh kompetensi SDM dan peran audit intern terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) baik secara langsung maupun melalui mediasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas LKPD, begitupun dengan peranan audit internal. Sedangkan pengaruh SPIP terhadap kualitas LKPD, diterima. Dari hasil penelitian juga ditunjukkan bahwa yang memengaruhi SPIP yakni kompetensi SDM, peran audit internal, dan mediasi dari SPIP oleh kompetensi SDM. Sementara peran audit yang dimediasi oleh SPIP tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

Silaban (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap

kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Demikian pula dengan komitmen organisasi yang dinilai mampu memoderasi hubungan antara pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Serdang Bedagai.

Ripnojayanthi (2017) meneliti tentang pengaruh sumber daya manusia terhadap hubungan penerapan sistem pengendalian intern dan peraturan perundangan pada kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan penerapan peraturan perundangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Demikian pula terhadap interaksi antara penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia serta interaksi antara penerapan peraturan perundangan dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Rijalulfikri (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien regresi dari ketiga variabel independen adalah positif. Hal ini berarti bahwa kompetensi sumber daya

manusia, sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Septarini dan Papilaya (2016) meneliti tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan pengaruh moderasi komitmen organisasi terhadap hubungan antara kompetensi SDM dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sistem pengendalian internal baik secara langsung maupun dengan moderasi komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Maksyur (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian intern serta pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kabupaten Indagiri Hulu. Hasilnya membuktikan bahwa keempat variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Jumavis Irvia Saputra, dkk (2020) melakukan penelitian tentang sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan aset tetap dan peran internal audit terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating (studi pada pemerintah provinsi riau) hasilnya membuktikan Kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan aset tetap dan peran internal audit secara parsial berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah, sistem

pengendalian intern memoderasi pengaruh pengelolaan aset tetap dan peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah, sedangkan sistem pengendalian intern tidak mampu memoderasi pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah.

BAB III

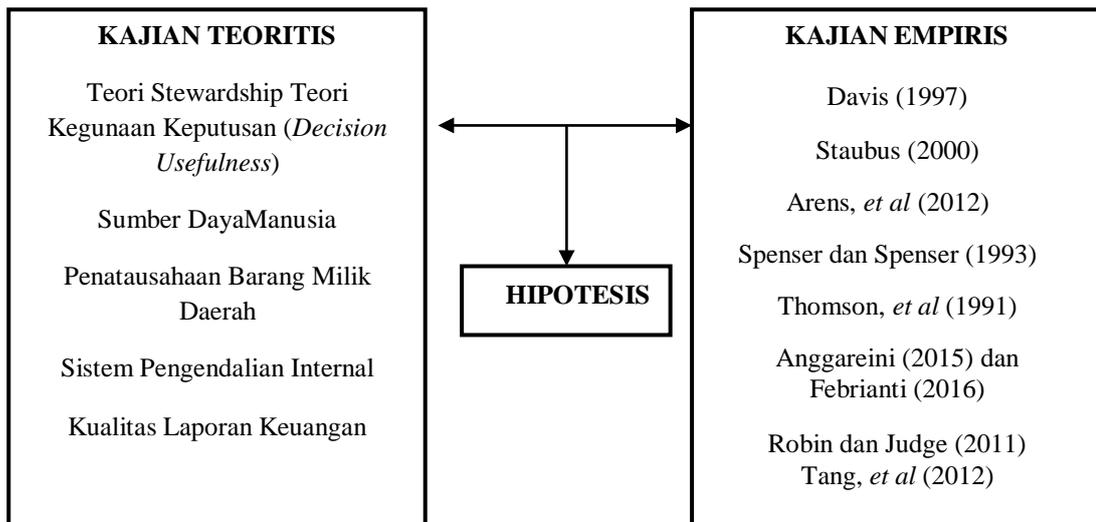
KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka. Kerangka berpikir merupakan kajian teoritis dan kajian empiris yang dirumuskan secara logis. Kajian teoritis merupakan teori pendukung dan kajian empiris merupakan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hipotesis penelitian dibentuk dari interaksi antara kajian teoritis dan kajian empiris. Hipotesis merupakan proposisi yang dimaksudkan untuk diuji dan dihubungkan dengan pengujian empiris. Hasil uji hipotesis selanjutnya diinterpretasikan dalam pembahasan yang menghasilkan kesimpulan dan saran.

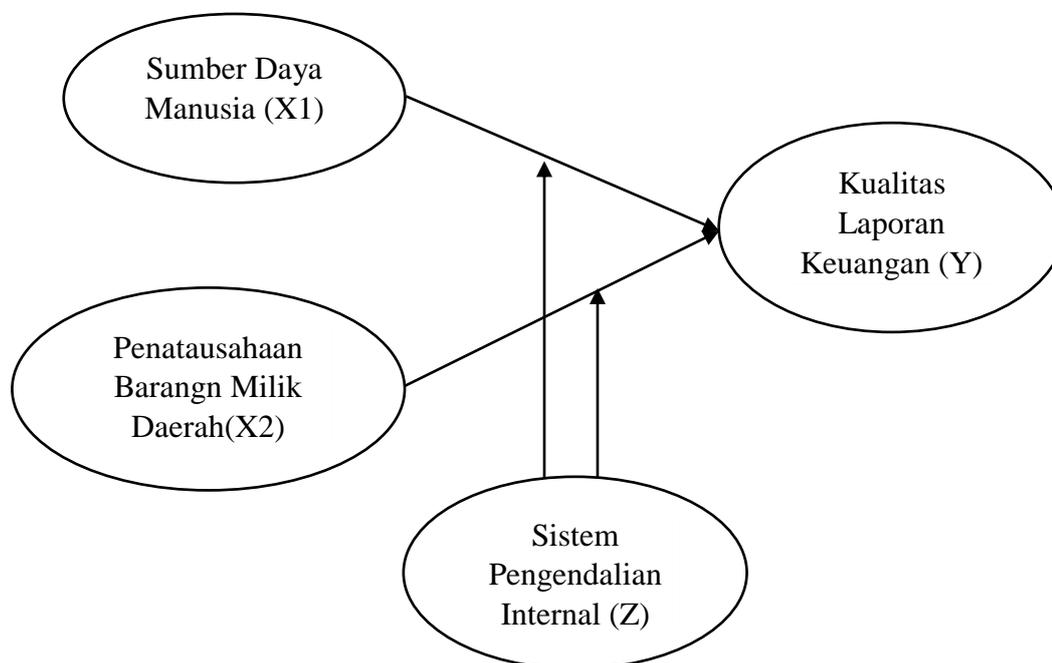
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan keterkaitan antara konsep serta penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan menguji dan menganalisis Analisis factor yang mempengaruhi

kualitas laporan keuangan pada maka, kerangka konseptual untuk membantu memahami penelitian ini dapat digambarkan seperti Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Kerangka Konseptual

3.2 Hipotesis

3.2.1 Sumber Daya Manusia (X1) Berpengaruh Secara Langsung Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Teori kegunaan keputusan menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan sangat penting dalam rangka pengambilan keputusan oleh para penggunanya. Artinya jika laporan keuangan tidak didukung oleh kualitas informasi yang baik, maka laporan keuangan tidak akan memberi manfaat dan sasaran organisasi tidak bisa dicapai. Sasaran organisasi yang optimal dapat dicapai melalui pengendalian yang dilaksanakan terhadap sumber daya manusia yang memiliki kompetensi

yang efektif dan efisien (Arens *et al.*, 2012).

Sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya. Suatu sistem yang sebaik apapun akan sia-sia begitu saja apabila tidak ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai khususnya kualitas pribadi sumber daya manusia yang terdiri dari potensi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan dari sumber daya yang bersangkutan. Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan. Hal ini meliputi sumber daya manusia yang tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahan. Sebaik apapun sistem yang dibangun, jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, memiliki integritas dan nilai etika, maka sistem itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. (Shabrina, 2014).

Hal ini juga dibuktikan oleh penelitian Rijalulfikri (2017) bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk dapat menyajikan informasi yang berkualitas, maka proses pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan memerlukan kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas.

Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Silaban (2017) menunjukkan bahwa komitmen organisasi mampu memoderasi hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Hipotesis ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Afnany *et al.* (2018), Triantoro dan Nugraha (2014), Septarini dan Papilaya (2016), dan Maksyur (2015). Sebaliknya, penelitian Syarifudin (2014), dan Karmila *et al.* (2014) membuktikan bahwa

kompetensi/kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas/keterandalan LKPD.

Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Suwanda (2014) yang membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia secara simultan mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas LKPD, namun secara parsial tidak terlalu berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Penelitian Sagara (2015), juga membuktikan bahwa secara simultan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, namun secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian dijabarkan sebagai berikut:

H₁: Sumber daya manusia berpengaruh positif secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan.

3.2.2 Penatausahaan Barang Milik Daerah (X₂) Berpengaruh Secara Langsung Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Menurut pemendagri no. 17 tahun 2007 serta pada tahun 2016 Menteri Dalam Negeri Menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam peraturan tersebut yang dimaksud barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Penatausahaan barang milik daerah dilakukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi termasuk menyusun laporan barang milik daerah yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca. Agar pelaksanaan

pengelolaan barang milik daerah dapat sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukma Febrianti (2016) dalam jurnal analisis pengaruh aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kuba kabupaten raya, dimana dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pembukuan, inventarisasi dan pelaporan berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kuba kabupaten raya. Okta Dwi Kurnianto (2017), juga mempertegas dalam temuannya bahwa penatausahaan barang milik daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu juga Novita Juwita Dkk, (2017) juga meneliti tentang pengaruh penatausahaan dan penerapan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN) terhadap kualitas laporan keuangan (studi pada kantor pusat dan kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jakarta) dimana dalam hasil temuannya menunjukkan bahwa pembukuan inventarisasi pelaporan, dan penerapan SIMAK BMN secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Secara parsial ditemukan bahwa pembukuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan inventarisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan dimana dalam teori ini yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sumber daya manusia sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat dan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian dijabarkan sebagai berikut:

H₂: *Penatausahaan barang milik daerah berpengaruh positif secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan*

3.2.3 Sistem Pengendalian Internal (Z) Memoderasi Pengaruh Sumber Daya Manusia (X1) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Suatu pengendalian internal bertujuan untuk menjaga organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Jika suatu pengendalian internal telah ditetapkan maka semua operasi, sumber daya, dan data akan terkendali, tujuan akan tercapai, resiko dapat diminimalisir, dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Selain itu, dengan adanya pengendalian internal, individu cenderung akan mematuhi aturan atau standar yang sesuai dan konsisten dengan norma internalnya.

Pengaruh pengendalian internal secara langsung dapat dirasakan terhadap kualitas laporan keuangan apabila kontrol internal dilakukan secara maksimal dalam suatu unit organisasi. Adapun pengaruh tidak langsung pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan yang diperantarai oleh komitmen organisasi dinilai mampu meningkatkan kualitas informasi akuntansi.

Hal ini sejalan dengan teori stewardship yang mana *model of man* ini didasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku yang dapat dibentuk agar selalu diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani.

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ripnojayanthi (2017) yang mengemukakan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya, semakin tinggi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah maka akan semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan pemerintah.

Namun hasil penelitian Jumavis Irvia Saputra, dkk (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak mampu memoderasi pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian dijabarkan sebagai berikut,

H₃: Sistem pengendalian internal memoderasi hubungan antara sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangani.

3.2.4 Sistem Pengendalian Internal (Z) Memoderasi Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah (X2) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan penerapan pengelolaan aset tetap. Apabila pengelolaan aset diterapkan dengan baik, maka akan menghasilkan informasi yang akurat dan meningkatkan efisiensi, efektifitas, untuk menciptakan nilai tambah didalam mengelola aset yang berguna untuk penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2016) yang mana dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern mampu memperkuat pengaruh

pengelolaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini juga sejalan dengan teori kegunaan keputusan dimana dalam teori ini informasi akuntansi menjadi referensi dalam penyusunan laporan keuangan melalui informasi akuntansi, inventarisasi dalam kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.dapat terlaksana sehingga dapat mewujudkan tertib pengelolaan barang milik daerah.

H₄: Sistem pengendalian internal memoderasi hubungan antara penatausahaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan,.